

SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKjIP Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dan LKjIP disusun berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang, juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan pemerintah. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil yang relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa mendatang.

Payakumbuh, Januari 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA PAYAKUMBUH



VONREPLA S. Sos. MAP
NIP. 19691108 199103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	1
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	3
1.5. Isu Strategis.....	3
1.6. Tindak Lanjut atas rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	15
3.2. Efisiensi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	28
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	28
LAMPIRAN	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah pegawai menurut kualifikasi jabatan, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan	4
Tabel 1.2.	Sarana Prasarana.....	5
Tabel 1.3.	Anggaran tahun 2024	6
Tabel 1.4.	Tindak Lanjut Atas Laporan Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2024.....	6
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh	10
Tabel 2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	10
Tabel 2.3.	Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	11
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024	14
Tabel 2.5.	Program untuk mewujudkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2024	14
Tabel 2.6.	Perubahan Anggaran Program	14
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat kinerja	16
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	17
Tabel 3.4.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024	21
Tabel 3.5.	Program/Kegiatan/Anggaran dan output yang dihasilkan sesuai sasaran	21
Tabel 3.6.	Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja sasaran	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dan Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh sebagai sub sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dari penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

1.2.1. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat dewan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

1.2.2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
4. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Sekretariat DPRD.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3. Bagian Hukum dan Persidangan

Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bagian Hukum dan Persidangan. Untuk melaksanakan tugas diatas, Bagian Hukum dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Hukum dan Persidangan.
2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Hukum dan Persidangan.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Hukum dan Persidangan.
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Hukum dan Persidangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2.4. Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD;
2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD;

4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

STRUKTUR SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH



1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana table berikut :

Tabel 1.1. Jumlah pegawai menurut kualifikasi jabatan, jenis kelamin, dan jenjang Pendidikan.

	Jabatan	Jenis Kelamin		Pendidikan			
		L	P	S 2	S 1	D 3	SMU
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			
B	Jabatan Administrasi						
	1. Administrator	3		3			
	2. Pengawas	1			1		
	3. Pelaksana	7	6		1	2	10
C	Jabatan Fungsional	1	6		4	2	1

Sumber : Bezetting Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.1 , tingkat Pendidikan SDM Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh relative tinggi yang di dominasi oleh jenjang S2 sebanyak 4 orang (16%), jenjang S1 sebanyak 6 orang (24%), jenjang D3 sebanyak 4 orang (16%), dan jenjang SMU sebanyak 11 orang (44%). Adapun perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki sebanyak 13 orang (52%) dan perempuan sebanyak 12 orang (48%). Jumlah total ASN yaitu 25 orang yang terdiri dari PNS 22 orang dan PPPK 3 orang.

Tabel 1.2. Sarana Prasarana

Klasifikasi	Nilai Aset
Aset tetap	Rp. 29.601.616.970
1. Tanah	Rp. 1.348.274.400
2. Peralatan dan Mesin	Rp.9.777.257.504
3. Gedung dan Bangunan	Rp.7.335.669.062
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.399.922.850
5. Aset tetap lainnya	Rp.39.988.345
6. Konstruksi dalam pengerjaan	Rp.-
7. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Rp.8.124.962.939
8. Akumulasi gedung dan bangunan	Rp.2.416.812.138
9. Akumulasi jalan, irigasi dan jaringan	Rp.158.729.432
10. Akumulasi asset tetap lainnya	Rp.-
Aset Lainnya	Rp.73.256.800
1. Kemitraan dengan pihak ketiga	Rp.-
2. Aset tidak berwujud	Rp.-
3. Aset lain-lain	Rp.36.628.400
4. Akumulasi Kemitraan dengan pihak ketiga	Rp.-
5. Akumulasi Aset tidak berwujud	Rp.-
6. Akumulasi Aset lain-lain	Rp.36.628.400

Sumber : Laporan Aset Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

Kendaraan dinas terdiri dari 4 (empat) unit kendaraan dinas jabatan yang meliputi 1 (satu) unit untuk operasional Ketua DPRD Kota Payakumbuh, 2 (dua) unit untuk operasional Wakil Ketua DPRD dan 1 unit untuk operasional Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh. Kemudian 3 unit kendaraan dinas operasional Kepala Bagian, serta 12 unit kendaraan operasional roda 2. Ditambah 3 unit bus hiace.

Ruangan kantor mencakup ruangan rapat paripurna, ruang pimpinan, ruang rapat komisi-komisi, ruang rapat bamus , ruang fraksi-fraksi, ruang sekwan, ruang bagian-bagian yang

meliputi bagian umum, bagian hukum dan persidangan serta bagian fasilitas fungsi penganggaran dan pengawasan, ruang arsip, musholla. Namun saat ini anggota DPRD belum memiliki ruang kerja masing-masing sehingga mereka menggunakan ruang fraksi.

Adapun perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, arsip, filling cabinet, komputer, printer, dll sudah tersedia dalam kondisi baik. Resiko peralatan komputer / laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1, ini menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 1.3. Anggaran tahun 2024

Kode rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan
5.1	Belanja operasi	35.238.383.839	36.654.407.389
5.1.01	Belanja pegawai	12.217.796.529	12.220.783.061
5.1.02	Belanja barang dan jasa	23.020.587.310	24.433.624.328
5.2	Belanja modal	262.598.828	346.561.928
5.2.02	Belanja modal peralatan dan mesin	207.067.300	296.784.200
5.2.03	Belanja modal Gedung & bangunan	55.431.528	49.777.728
5.2.05	Belanja modal asset tetap lainnya	100.000	0
Jumlah belanja		35.500.982.667	37.000.969.317

Sumber : DPAP Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh berasal dari APBD Kota Payakumbuh. Terlihat pada table 1.3, untuk tahun 2024 anggaran Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh semula Rp. 35.500.982.667 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 37.000.969.317,- atau bertambah sebesar Rp. 1.499.986.650,-

1.5 Isu Strategis

Isu strategis Sekretariat DPRD kota Payakumbuh yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu “belum optimalnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD”.

1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2024

Tabel 1.4. Tindak Lanjut Atas Laporan Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2024

Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
Agar pemerintah Kota Payakumbuh membuatkan Perwako terbaru tentang Juklis Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu dan Evaluasi ata Laporan Kinerja mengaku kepada	-

PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 dan Implementasi SAKIP sesuai dengan PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021.	
Agar pada perencanaan kinerja yang akan datang, target kinerja dilengkapi dengan perbandingan target minimal yang ditetapkan pada Renja/renstra dengan target propinsi atau RPJMN.	Bersedia melengkapi target kinerja dengan perbandingan target minimal yang ditetapkan pada renja/renstra dengan target propinsi atau RPJMN.
Agar Diagram Crosscutting disempurnakan, dengan menggambarkan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Bersedia menyempurnakan diagram Crosscutting dengan menggambarkan aktifitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
Agar menjelaskan progress setiap triwulannya, poin-poin aktifitas yang direncanakan telah dilaksanakan atau belum, tercapai atau tidak atau sesuai harapan dan bagaimana poin-poin tindak lanjut atau solusi kedepannya/pada triwulan berikutnya.	Bersedia menjelaskan progress setiap triwulannya, poin-poin aktifitas yang direncanakan.
Agar memberikan rekomendasi untuk sesuai rencana aksi (missal: diubah metode, diganti, dilanjutkan/tidak dilanjutkan, dan lain sebagainya) agar lebih efektif mencapai kinerja.	Bersedia memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan rencana aksi.
Agar pengukuran kinerja dilaksanakan dan dilaporkan secara berjenjang, mulai di tingkat OPD (eselon II) hingga lefel jabatan dibawahnya (eselon II, IV dan fungsional).	Bersedia melaksanakan dan melaporkan pengukuran kinerja secara berjenjang.
Agar Laporan Kinerja tak hanya menginformasikan pencapaian kinerja sebatas PK eselon II, namun juga untuk jajaran level dibawahnya (eselon 3,4 dan fungsional) dan bukan hanya melaporkan pencapaian realisasi anggaran, melainkan juga target kinerja sebagaimana yang diperjanjikan didalam PK.	Bersedia melengkapi informasi pencapaian kinerja hingga ke jajaran level bawah (eselon 3,4 dan fungsional).
Agar dimasa datang hasil pengukuran kinerja dapat dimanfaatkan dan menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional, yang mengatur penempatan kerja pegawai seperti mutasi, rotasi promosi, demosi hingga pemberhentian yang berdasarkan hasil atau capaian kinerja dari pegawai.	Bersedia memanfaatkan hasil pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional yang mengatur penempatan kerja pegawai seperti mutasi, rotasi-promosi, demosi hingga pemberhentian yang berdasarkan hasil atau capaian kinerja dari pegawai.
Agar Laporan Kinerja juga menyajikan informasi perbandingan tahun n dengan tahun n-1 hingga realisasi tahun n-2.	Bersedia menyajikan informasi perbandingan tahun n dengan tahun n-1 hingga realisasi tahun n-2 pada laporan kinerja.

Agar Laporan Kinerja juga memberikan informasi perbandingan realisasi capaian kinerja OPD dengan capaian realisasi nasional dan internasional.	Bersedia melengkapi informasi perbandingan nasional dan internasional.
Agar Laporan Kinerja juga memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara eksplisit dan implisit.	Bersedia memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara eksplisit dan implisit pada laporan kinerja.
Agar Evaluasi internal dapat dilaksanakan oleh SDM yang memadai, yaitu personil yang telah mengikuti pembekalan berupa diklat/bimtek evaluasi Sakip yang dibuktikan dengan sertifikat.	Bersedia melaksanakan evaluasi internal oleh SDM yang memadai (personil yang telah mengikuti pembekalan berupa diklat/bimtek evaluasi Sakip yang dibuktikan dengan sertifikat) jika SDM nya telah tersedia, dan akan mengirim personil untuk mengikuti bimtek jika ada bimtek dimaksud.
Dokumen Laporan Kinerja yang telah disusun sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar disampaikan tepat waktu kepada Walikota paling lambat 2 bln setelah Tahun Anggaran berakhir dan memberikan bukti pengiriman / penyerahan dokumen Laporan Kinerja / Tanda Terima LKJIP.	Bersedia menyampaikan dokumen laporan kinerja tepat waktu kepada Walikota paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan memberikan bukti pengiriman/penyerahan dokumen laporan kinerja / tanda terima LKJIP.
Agar seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP yang diberikan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Bersedia menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Sakip yang diberikan untuk perbaikan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sumber : LHE Sakip Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi pendapat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis perangkat daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 dilakukan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 yang ditetapkan dengan peraturan Walikota nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026.

Rencana strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023 – 2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif empat tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dan mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa. Selanjutnya rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh akan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD kota payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode (satu) 1 tahun. Dalam kerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dimuat program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Visi jangka Panjang Kota Payakumbuh tahun 2005-2025 adalah *“Terwujudnya payakumbuh sebagai kota maju dengan pengembangan sentra usaha mikro, kecil dan menengah”*. Sedangkan visi misi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh yaitu *“ Terwujudnya*

pelayanan yang prima dan professional dalam memfasilitasi tugas-tugas dprd kota payakumbuh". Dan untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD tersebut diatas, Sekretariat DPRD menetapkan misi *"Meningkatkan kualitas dan efektifitas fasilitasi tugas dan fungsi dprd kota payakumbuh"*. Terkait hal diatas, tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima pada Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh	Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Nilai IKM	84	84	85	86

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan fasilitas Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> – Mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD – Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kepada DPRD dalam menunjang urusan pemerintahan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> – Mengoptimalkan fasilitas pelaksanaan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD – Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran – Mengoptimalkan fasilitasi pengawasan kebijakan anggaran pemerintah – Mengoptimalkan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD – Mengoptimalkan fasilitas penyerapan dan penghirupan aspirasi masyarakat – Mengoptimalkan fasilitasi tugas-tugas DPRD – Meningkatkan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah – Meningkatkan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah – Meningkatkan pelaksanaan administrasi kepegawaian

					<ul style="list-style-type: none"> perangkat daerah – Meningkatkan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah – Meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah – Meningkatkan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah – Meningkatkan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah – Meningkatkan pelaksanaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD – Meningkatkan pelaksanaan layanan administrasi DPRD
--	--	--	--	--	---

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tabel 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Kode					Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4	02				SEKRETARIAT DPRD	Rp. 35.500.982.667	Rp. 37.000.969.317	Rp. 1.499.997.000
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 17.915.483.267	Rp. 18.007.218.317	Rp. 82.392.950
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 28.784.400	Rp. 25.724.000	(Rp. 3.06.400)
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daer	Rp. 12.324.050	Rp. 12.046.500	(Rp.277.550)
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Rp. 16.460.350	Rp. 13.677.500	(Rp. 2.792.850)
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.910.007.639	Rp. 2.931.524.171	Rp. 21.516.532
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.687.895.639	Rp. 2.690.882.171	Rp. 2.986.532
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 222.112.000	Rp. 240.642.000	Rp. 18.530.000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.764.818.050	Rp. 2.661.341.850	(Rp. 103.470.950)
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 21.021.800	Rp. 21.009.550	(Rp. 12.250)

4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 523.567.700	Rp. 337.927.500	(Rp. 185.640.200)
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 131.215.350	Rp. 153.713.850	Rp. 22.498.500
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 27.644.750	Rp. 27.644.750	—
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	Rp. 50.018.100	Rp. 50.018.100	—
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 382.007.350	Rp. 382.007.350	—
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.629.343.000	Rp. 1.689.026.000	(Rp.59.683.000)
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.753.800	Rp. 0	(Rp.5.753.800)
4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 5.653.800	Rp. 0	(Rp.5653.800)
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 100.000	Rp. 0	(Rp.100.000)
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 980.720.460	Rp. 989.133.078	Rp.8.412.618
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 230.521.488	Rp. 235.586.088	Rp. 5.044.600
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 750.198.972	Rp. 753.546.990	Rp.3.348.018
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 853.535.728	Rp. 853.535.728	(Rp.15.400.000)
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 217.600.000	Rp. 217.600.000	--
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 402.340.000	Rp. 386.940.000	(Rp.15.400.000)
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 83.718.000	Rp. 83.718.000	--
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 149.877.728	Rp. 149.877.728	--
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 9.990.734.890	Rp. 10.240.734.890	Rp.250.000.000
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp. 9.339.484.890	Rp. 9.339.484.890	--

4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp. 620.000.000	Rp. 870.000.000	Rp.250.000.000
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp. 31.250.000	Rp. 31.250.000	--
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Rp. 381.128.300	Rp. 311.277.250	(Rp.69.851.050)
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp. 355.670.500	Rp. 295.231.850	(Rp.69.849.000)
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp. 25.457.800	Rp. 25.455.750	(Rp.2.050)
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 17.585.499.400	Rp. 18.993.688.000	Rp.1.417.604.050
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 88.999.650	Rp. 88.999.650	--
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 88.999.650	Rp. 88.999.650	--
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp. 426.245.700	Rp. 423.729.050	(Rp.2.516.650)
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp. 35.720.850	Rp. 35.720.850	--
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 16.698.950	Rp. 16.698.950	--
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Rp. 183.825.100	Rp. 195.183.350	Rp.11.358.250
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Rp. 152.658.350	Rp. 145.855.950	(Rp.6.802.400)
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp. 37.342.450	Rp. 30.269.950	(Rp.7.072.500)
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 141.964.550	Rp. 114.122.050	(Rp.27.842.500)
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp. 38.208.700	Rp. 38.753.700	Rp.545.000
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastrukturu	Rp. 35.871.600	Rp. 25.221.600	(Rp.10.650.000)
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp. 36.218.100	Rp. 24.993.100	(Rp.11.225.000)
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp. 31.666.150	Rp. 25.153.650	(Rp.6.542.500)
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 1.230.418.950	Rp. 1.119.234.700	(Rp.104.768.800)
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Rp. 616.595.750	Rp. 541.460.750	(Rp.75.135.000)
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp. 244.750.000	Rp. 244.750.000	--
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp. 369.073.200	Rp. 333.023.950	(Rp.26.633.800)
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 7.157.202.550	Rp. 7.680.221.550	Rp.523.029.000
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp. 5.366.513.000	Rp. 5.889.532.000	Rp.523.029.000
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Rp. 1.790.689.550	Rp. 1.790.689.550	--

4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 8.540.668.000	Rp. 9.567.381.000	Rp.1.026.713.000
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp. 8.540.668.000	Rp. 9.567.381.000	Rp.1.026.713.000

Sumber : DPAP Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD kota Payakumbuh tahun 2024 mengacu pada dokumen Rensra Sekretariat DPRD kota Payakumbuh tahun 2023-2026, dokumen rencana kerja tahunan (RKT) 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024. Sekretariat DPRD kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Nilai IKM	84

Sumber : Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Program untuk mewujudkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2024

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.915.483.267
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 17.585.499.400

Sumber : DPA Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh tahun 2024 tidak mengalami perubahan, namun anggaran program mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perubahan anggaran program

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.007.281.317
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 18.993.688.000

Sumber : DPA Perubahan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh telah melaksanakan penyusunan kinerja atas kinerja yang di perjanjian Sekretariat DPRD kota Payakumbuh dengan Walikota Payakumbuh tahun 2024. Penyusunan kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revisi atas laporan kinerja instansi pemerintah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat kinerja

No	Kategori Capaian	Nilai Capaian
1	91>90	Sangan Baik
2	75.00 – 89.99	Baik
3	65.00 – 74.99	Cukup
4	50.00 – 64.99	Kurang
5	0 – 49.00	Sangat Kurang

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Kinerja Tahun 2024				Target Akhir RPD
						Target	Realisasi	Persentase	Kategori	
1	Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Nilai IKM	Kategori	84,11	84,85	84	84,26	100,3	Sangat Baik	86

Sumber : Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dapat dilihat dari satu indikator yaitu nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Nilai IKM ini diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap pimpinan dan anggota DPRD pada tahun 2024 telah dilaksanakan dua kali survey yaitu periode 1 (Januari-Juni) diperoleh hasil 85,46 dan periode 2 (Juli-Desember) diperoleh hasil 84,26

Capaian kinerja indikator nilai IKM adalah sebesar 84,26 dari target sebesar 84 diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Sehingga persentase capaian kinerja adalah 100,3 % atau mencapai target yang diperjanjikan. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat sedikit penurunan dimana realisasi tahun sebelumnya yaitu 101 %.

Keberhasilan capaian sasaran strategis, dengan indikator nilai ikm tersebut didukung oleh keberhasilan program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.					91,14%
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.				100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.				100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Orang	24 Orang	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.				100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.				100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.				100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	100%
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.				100%
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	25 Orang	25 Orang	100%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan			100%

	DPRD.	Atribut DPRD yang Disediakan			
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 orang	6 orang	24%
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.				100%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD.					100%
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.				100%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 dokumen	5 renperda	100%
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.				100%
	Pembahasan KUA dan PPAS.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembahasan APBD.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembahasan APBD Perubahan.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.				100%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah dan Hukum.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.				100%
	Pendalaman Tugas DPRD.	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan.	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	100%
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100%
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Pelaksanaan Reses.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD				100%
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Sumber : Laporan Evaluasi Internal Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

Keberhasilan capaian indikator sasaran ini didukung oleh keberhasilan 14 kegiatan dan 38 Sub kegiatan.

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program /

kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	
1	Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Nilai IKM	84	84,26	100,3%	37.000.969.317	34.171.421.910	92,35%	2.829.547.407

Sumber : Dokumen Hasil SKM, Laporan Pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

Berdasarkan table 3.4 diatas, capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD kota Payakumbuh melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.34.171.421.910 atau sebesar 92,35% dari target Rp.37.000.969.317 sehingga dapat dikatakan efisien

Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.2.829.547.407 atau 7,65% yang bersumber dari.

- Efisiensi pada makan minum rapat-rapat perencanaan dan evaluasi
- Efisiensi pada penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, logistic kantor, fasilitasi kunjungan tamu dan efisiensi biaya pendampingan, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan jasa pelayanan umum kantor
- Sisa Pengadaan barang/pakaian dinas dan atribut DPRD
- Efisiensi anggaran medical chek up karena hanya 6 orang anggota DPRD yang Melaksanakan Medical chek up
- Efisiensi pada kegiatan pendalaman tugas DPRD/Bimtek anggota DPRD, serta kegiatan kunjungan kerja.

Gambaran tentang Program/Kegiatan/Sub kegiatan anggaran dan output yang dihasilkan sesuai sasaran

Tabel 3.5 Program/Kegiatan/Anggaran dan output yang dihasilkan sesuai sasaran.

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	25.724.000	11.657.950	Nilai IKM Nilai AKIP oleh Inspektorat	Menunjang
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	12.046.500	5.720.500	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menunjang

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	13.677.500	5.937.450	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Menunjang
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	2.931.524.171	2.581.118.356	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	Menunjang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	2.690.882.171	2.352.496.356	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Menunjang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	240.642.000	228.622.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menunjang
Administrasi Umum Perangkat Daerah.	2.661.341.550	2.278.742.511	Persentase layanan umum Sekretariat Dewan yang sesuai standar	Menunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	21.009.550	17.313.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Menunjang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	337.922.250	292.169.550	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Menunjang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	153.713.850	125.394.400	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Menunjang
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.	27.644.750	15.861.950	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Menunjang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	50.018.100	39.780.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Menunjang
Fasilitasi Kunjungan Tamu.	382.007.350	260.759.075	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Menunjang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.689.026.000	152.7464.536	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menunjang
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	989.133.078	864.568.061	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Menunjang

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	235.586.088	195.102.773	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Menunjang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	753.546.990	669.465.288	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Menunjang
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	838.135.728	691.230.601	Persentase kondisi sarana dan prasara kantor dalam kondisi baik	Menunjang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.	217.600.000	170.576.910	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Menunjang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	386.940.000	311.117.549	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Menunjang
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.718.000	66.531.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Menunjang
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	149.877.728	143.005.142	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Menunjang
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.	10.240.734.890	9.747.695.563	Persentase terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Menunjang
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.	9.339.484.890	8.944.155.563	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Menunjang
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.	870.000.000	796.640.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Menunjang
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.	31.250.000	6.900.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Menunjang

	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.	320.687.600	236.267.000	Persentase terlaksananya layanan administrasi DPRD	Menunjang	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	295.231.850	215.963.500	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Menunjang	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	25.455.750	20.303.500	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	Menunjang	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD.	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.	88.999.650	51.427.550	Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Menunjang	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.	88.999.650	51.427.550	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Menunjang	
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.	423.729.050	297.453.240	Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	Menunjang	
	Pembahasan KUA dan PPAS.	35.720.850	25.377.465	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Menunjang	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.	16.698.950	8.370.500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Menunjang	
	Pembahasan APBD.	195.183.350	142.107.150	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Menunjang	
	Pembahasan APBD Perubahan.	145.855.950	92.492.500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Menunjang	
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD.	30.269.950	29.105.625	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Menunjang	
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.	114.122.050	13.551.800	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Menunjang	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.	38.753.700	5.558.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Menunjang	

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.	25.221.600	1.600.800	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Menunjang
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.	24.993.100	5.070.000	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Menunjang
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.	25.153.650	1.323.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Menunjang
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.	1.119.234.700	782.246.920	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Menunjang
	Pendalaman Tugas DPRD.	541.460.750	247.362.500	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Menunjang
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan.	333.023.950	323.134.420	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Menunjang
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.	24.4750.000	211.750.000	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Yang dibayarkan	Menunjang
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.680.221.550	7.230.906.401	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Menunjang
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah.	889.532.000	5.562.440.251	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Menunjang
	Pelaksanaan Reses.	1.790.689.550	1.668.466.150	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Menunjang
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	9.567.381.000	9.384.555.957	Persentase terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	Menunjang
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.	9.567.381.000	9.384.555.957	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Menunjang Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Menunjang

Sumber : Laporan Evaluasi Internal Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2024

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja dan sasaran meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6 Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja sasaran

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya fasilitas Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	1.1	Nilai IKM	Indeks	84	84,26	100,3	1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.007.281.317	16.411.280.042	91,14
								1.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.993.688.000	17.760.141.868	93,51
								Rata-rata capaian dari 1 indikator			100,3	
Tingkat Efisiensi								7,98				
Tingkat Efektifitas								1,09				

Keterangan : Dari Tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai sasaran : Meningkatnya fasilitas Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Capaian Kinerja dari indikator Nilai IKM sebesar 100,3% sedangkan capaian keuangan dari kedua program yang mendukung yaitu 92,32%. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 7,98%, sedangkan tingkat efektifitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan yaitu sebesar 1,09%

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan.

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD kota Payakumbuh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. LKjIP Sekretariat DPRD kota Payakumbuh tahun 2024 ini menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD kota Payakumbuh dan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai baik itu target kinerja kegiatan ataupun anggaran. Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD kota Payakumbuh tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut. Sekretariat DPRD kota Payakumbuh yang memiliki sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dengan indikator nilai IKM telah memenuhi target yang telah ditetapkan, terealisasi sebesar 84,26 % atau 103 % dari target yang ditetapkan sebesar 84,00 %
2. Hambatan dan permasalahan
 - a. Ketidak selarasan renja dengan kebutuhan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya
 - b. Masih kurangnya inovasi pelayanan untuk meningkatkan kinerja
 - c. Kualitas kinerja masih belum optimal karena kompetensi dan kapabilitas pegawai yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhab kerja
 - d. Masih lemahnya pemantauan dan pengawasan kinerja pegawai
3. Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kinerja
 - a. Kerja sama yang baik dari seluruh jajaran Sekretariat DPRD
 - b. Dukungan anggaran yang memadai
 - c. Adanya regulasi yang jelas

4.2 Langkah-langkah perbaikan kedepan

- a. Menyempurnakan dan mematuhi SOP setiap kegiatan
- b. Mengikutsertakan pegawai pada bimbingan teknis yang berorientasi pada pengembangan kapasitas dan kapabilitas pegawai
- c. Perbaiki suasana kerja organisasi yang demokratis yang mendorong inisiatif pegawai, semangat kompetitif untuk mencapai kualitas kerja terbaik

Payakumbuh, Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA PAYAKUMBUH



YONRELL S. Sos. MAP

NIP. 19691108 199103 1 006

LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Nilai IKM	85

Payakumbuh, Januari 2025
Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh



[Handwritten signature in blue ink]

YONRI ELI, S.Sos, MAP
NIP. 196911081991031006

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kota : Payakumbuh

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Nilai IKM	84	84,26	100,3

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024

Rp. 37.000.969.317

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

Rp. 34.171.421.910

Payakumbuh, Januari 2025
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH



CONREFLI, S.Sos. MAP
NIP. 19691108 199103 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yonrefli, S.Sos, MAP**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Jasman, MM**
Jabatan : Pj. Walikota Payakumbuh
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

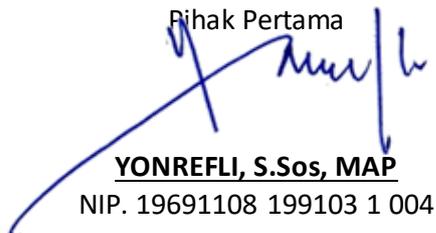
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Drs. JASMAN, MM
NIP. 19680101 198809 1 001

Pihak Pertama

YONREFLI, S.Sos, MAP
NIP. 19691108 199103 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

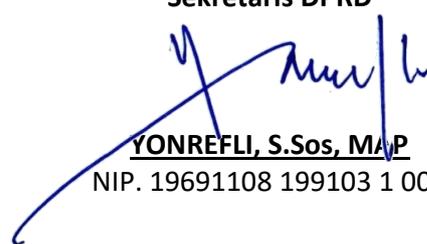
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Nilai IKM	85

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	17.997.876.217,-
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	19.003.103.450,-
Jumlah		Rp.	37.000.976.667,-

Payakumbuh, Oktober 2024

Pj. Walikota Payakumbuh

Drs. JASMAN, MM
NIP. 19680101 198809 1 001

Sekretaris DPRD

YONREFLI, S.Sos, M.A.P
NIP. 19691108 199103 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JULFITER, S.E, M.M**

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YONREFLI, S.Sos, MAP**

Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

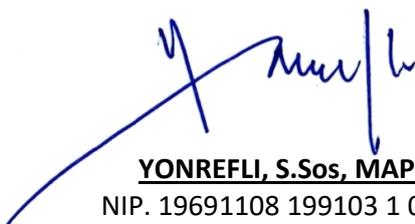
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,


YONREFLI, S.Sos, MAP
NIP. 19691108 199103 1 004

Pihak Pertama,


JULFITER, S.E, M.M
NIP. 19670726 199308 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitas, sarana prasarana kelembagaan.	% sarana prasarana kantor dalam kondisi baik.	90%
		% fasilitas penunjang kinerja DPRD dalam kondisi baik.	90%
2.	Meningkatnya fasilitas dan sarana prasarana pimpinan dan anggota DPRD.	% sarana prasarana rumah jabatan dalam kondisi baik.	90%
		Jumlah tunjangan dibayarkan sesuai standar.	100%
3.	Meningkatnya fasilitasi administrasi kepegawaian dan keuangan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD	84
4.	Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	1 Jenis

Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.712.054.717,-
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 9.567.381.000,-
Jumlah		27.279.435.717,-

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,


YONREFLI, S.Sos, MAP
 NIP. 19691108 199103 1 004

Pihak Pertama,


JULFITER, S.E, M.M
 NIP. 19670726 199308 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WENGKI, S.H, M.H**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum & Persidangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YONREFLI, S.Sos, MAP**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

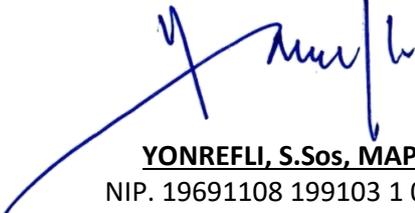
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,



YONREFLI, S.Sos, MAP
NIP. 19691108 199103 1 004

Pihak Pertama,



WENGKI, S.H, M.H
NIP. 19821016 200604 1 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi persidangan	% Pelaksanaan persidangan sesuai jadwal	100 %
		% Kehadiran dalam persidangan	85 %
		% Risalah persidangan yang diarsipkan sesuai standar	100 %
		% Risalah persidangan yang diteruskan ke peserta sidang	100 %
		% kegiatan DPRD yang dipublikasikan melalui website setwan	90 %
2.	Meningkatnya fasilitasi Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	% Laporan perjalanan dinas tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya kualitas publikasi aktifitas DPRD	% Kegiatan DPRD yang dipublikasikan melalui Website Setwan	90 %
		Jumlah Pengunjung Website Setwan	1250 orang
4.	Meningkatnya fasilitasi Bimtek untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek yang difasilitasi	3 kali

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	285.821.500,-
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	8.897.871.350,-
	Jumlah	Rp.	9.183.692.850,-

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,


YONREFLI, S.Sos, MAP
NIP. 19691108 199103 1 004

Pihak Pertama


WENGKI, S.H, M.H
NIP. 19821016 200604 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDHY DHARMA PERMANA, S.Sos., M M.Par**
Jabatan : Kepala Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
Selanjutnya disebut pihak pertama

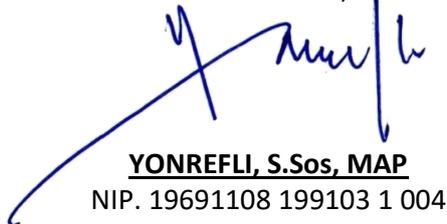
Nama : **YONREFLI, S.Sos, MAP**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



YONREFLI, S.Sos, MAP
NIP. 19691108 199103 1 004

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Pertama,



BUDHY DHARMA PERMANA, S.Sos., M M.Par
NIP. 19700318 199701 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGIAN FASILITASI FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi persidangan	1. % pelaksanaan persidangan sesuai jadwal. 2. % kehadiran dalam persidangan. 3. % risalah persidangan yang diarsipkan sesuai standar. 4. % risalah persidangan yang diteruskan ke peserta sidang.	100 % 85 % 100 % 100 %
2.	Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan DPRD	1. Jumlah Hearing yang dilaksanakan. 2. Jumlah turun lapangan yang dilaksanakan. 3. Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan	15 15 15

Program		Anggaran	
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	537.851.100,-
Jumlah		Rp.	537.851.100,-

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,


YONREFLI, S.Sos, MAP
 NIP. 19691108 199103 1 004

Pihak Pertama,


BUDHY DHARMA PERMANA, S.Sos., M M.Par
 NIP. 19700318 199701 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JEBRI ABDI, S.Sos**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JULFITER, S.E, M.M**
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,



JULFITER, S.E, M.M

NIP. 19670726 199308 1 001

Pihak Pertama,



JEBRI ABDI, S.Sos

NIP. 19720417 200312 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitas sarana prasarana kelembagaan.	- % sarana prasarana kantor dalam kondisi baik. - % fasilitas penunjang kinerja DPRD dalam kondisi baik.	90% 90%
2.	Meningkatnya fasilitas dan sarana prasarana Pimpinan dan Anggota DPRD.	- % sarana prasarana rumah jabatan dalam kondisi baik. - Jumlah tunjangan dibayarkan sesuai standar.	90% 90%
3.	Meningkatnya fasilitasi administrasi kepegawaian dan keuangan.	- % indeks kepuasan masyarakat (SKM) DPRD.	84%
4.	Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	- Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan.	1 jenis

Kegiatan		Anggaran
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 12.046.500,-
2.	Evaluasi Kinerja Kegiatan	Rp. 13.667.500,-
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.690.882.171,-
4.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 240.642.000,-
5.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. ,-
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 21.009.550,-
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 337.927.500,-
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 153.713.850,-
9.	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Rp. 27.644.750,-
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 50.018.100,-
11.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 382.007.350,-
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.689.026.000,-
13.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. ,-
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. ,-
15.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. ,-
16.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. ,-
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. ,-
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 235.586.088,-

19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	753.546.489,-
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	217.600.000,-
21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	386.940.000,-
22.	Pemeliharaan Mebel	Rp.	83.718.000,-
23.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	,-
24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	149.877.728,-
25.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp.	9.339.484.890,-
26.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp.	870.000.000,-
27.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp.	31,250,000,-
28.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp.	25,455.750,-
29.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp.	9.567.381.000,-
	Jumlah	Rp.	27.279.435.717,-

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,



JULFITER, S.E, M.M

NIP. 19670726 199308 1 001

Pihak Pertama,



JEBRI ABDI, S.Sos

NIP. 19720417 200312 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOVI SANDRA, S.Kom**

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JULFITER, S.E, M.M**

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

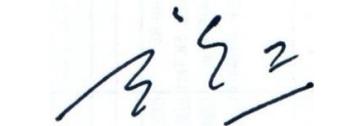
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,


JULFITER, S.E, M.M
NIP. 196707261993081001

Pihak Pertama,


YOVI SANDRA, S.Kom
NIP. 19761209 200501 2004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERENCANA AHLI MUDA
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

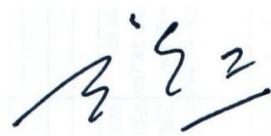
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi administrasi kepegawaian dan keuangan (Meningkatnya ketaatan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah)	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, dokumen anggaran dan dokumen evaluasi kinerja	100%

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,


JULFITER, S.E, M.M
NIP. 196707261993081001

Pihak Pertama,


YOVI SANDRA, S.Kom
NIP. 19761209 200501 2004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERAWATY, S.ST.Ars**
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WENGKI, S.H, M.H**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Persidangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,



WENGKI, S.H, M.H
NIP. 19821016 200604 1 005

Pihak Pertama,



HERAWATY, S.ST.Ars
NIP. 19780110 199703 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PRANATA HUMAS AHLI MUDA
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi persidangan	1. % Pelaksanaan persidangan sesuai jadwal. 2. % Kehadiran dalam persidangan. 3. % Risalah persidangan yang diarsipkan sesuai standar. 4. % Risalah persidangan yang diteruskan ke peserta siding.	100 % 85 % 90 % 90 %
2.	Meningkatnya kualitas publikasi aktifitas DPRD.	1. % Kegiatan DPRD yang dipublikasikan melalui website setwan 2. Jumlah pengunjung website setwan	90% 1.250
3.	Meningkatnya fasilitasi pendalaman tugas DPRD.	Jumlah Bimtek yang difasilitasi 3 kali.	1 kali

Sub Kegiatan		Anggaran	
1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD	Rp.	285.821.500,-
2.	Pendalaman Tugas DPRD	Rp.	541.460.750,-
3.	Publikasi Dan Dokumentasi Dewan	Rp.	342.439.400,-
4.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp.	244.750.000.-
Jumlah		Rp.	1.414.471.650,-

Payakumbuh, Oktober v2024

Pihak Kedua,



WENGI, S.H, M.H
NIP. 19821016 200604 1 005

Pihak Pertama,



HERAWATY, S.ST.Ars
NIP. 19730110 199703 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHERNI AWAL, SH**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WENGKI, S.H, M.H**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Persidangan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengam8bil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,



WENGKI, S.H, M.H
NIP. 19821016 200604 1 005

Pihak Pertama,



SUHERNI AWAL, SH
NIP. 19671227 199703 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS HUKUM AHLI MUDA
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi persidangan	1. % Pelaksanaan persidangan sesuai jadwal. 2. % Kehadiran dalam persidangan. 3. % Risalah persidangan yang diarsipkan sesuai standar. 4. % Risalah persidangan yang diteruskan ke peserta hukum 5. Jumlah dokumen hasil pembahasan Ranperda dan Peraturan DPRD.	100 % 85 % 100 % 100 % 10 dokumen
2.	Meningkatnya fasilitasi rapat koordinasi dalam dan luar daerah	Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD.	8 laporan

Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp. 88.999.650,-
2.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Rp. 5.889.532.000,-
3.	Pelaksanaan Reses	Rp. 1.790.689.550,-
Jumlah		Rp 7.769.221.200,-

Payakumbuh, Oktober 2024

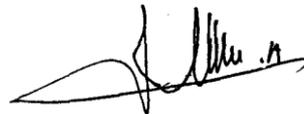
Pihak Kedua,



WENGI, S.H, M.H

NIP. 19821016 200604 1 005

Pihak Pertama,



SUHERNI AWAL, SH

NIP. 19671227 199703 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAFRIZAL**
Jabatan : Perisalah Legislatif Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDHY DHARMA PERMANA, S.Sos., M M.Par**
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran & Pengawasan DPRD
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,



BUDHY DHARMA PERMANA, S.Sos., M M.Par
NIP. 19700318 199701 1 001

Pihak Pertama,



SYAFRIZAL
NIP. 19741112 200003 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA
SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan DPRD	1. Jumlah Hearing yang dilaksanakan. 2. Jumlah turun lapangan yang dilaksanakan. 3. Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan	15 kali 15 kali 15 kali

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembahasan KUA Dan PPAS	Rp.	35.720.850,-
2.	Pembahasan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Rp.	16.698.950,-
3.	Pembahasan APBD	Rp.	195.183.350,-
4.	Pembahasan APBD Perubahan	Rp.	145.855.950,-
5.	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Rp.	30.269.950,-
6.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Rp.	38.753.700,-
7.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp.	25.221.600,-
8.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp.	24.993.100,-
9.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp.	25.153.650,-
Jumlah		Rp.	537.851.100,-

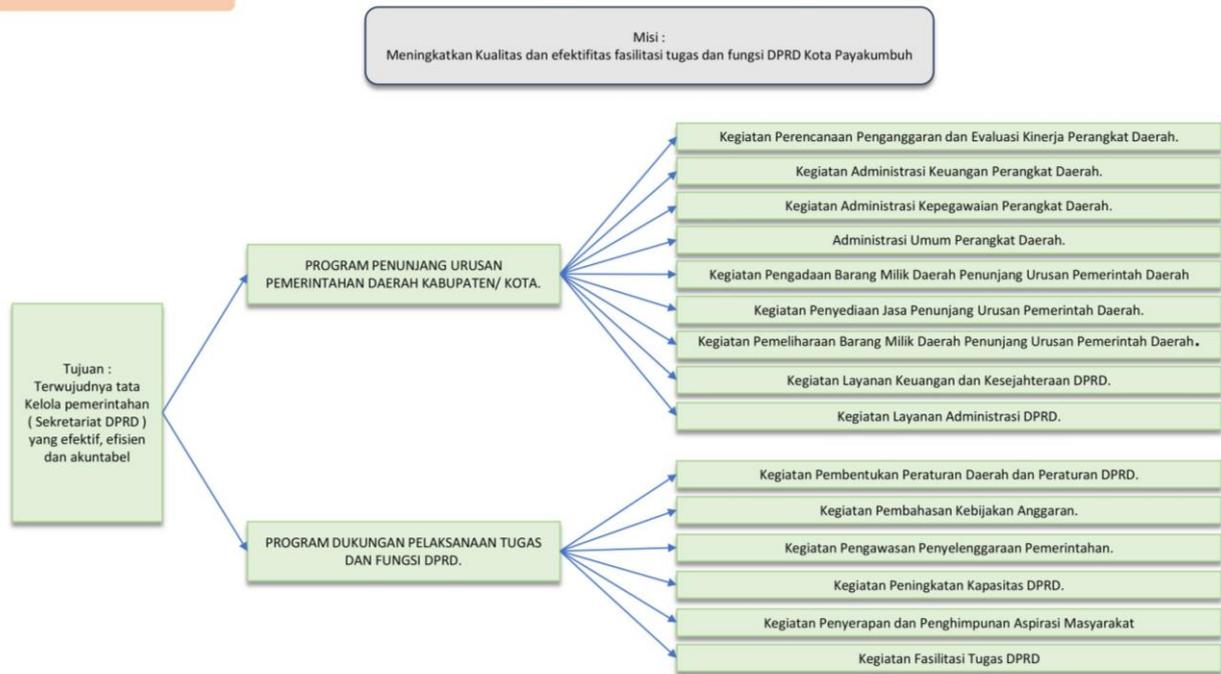
Payakumbuh, Oktober 2024

Pihak Kedua,

BUDHY DHARMA PERMANA, S.Sos., M M.Par
NIP. 19700318 199701 1 001

Pihak Pertama,

SYAFRIZAL
NIP. 19741112 200003 1 004



No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
			Administrasi Umum Perangkat Daerah.
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
			Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.
			Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD.	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
			Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.
			Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.
			Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
			Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

PROSEDUR: SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Sekretaris DPRD	Kabag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Program dan Keuangan	Bagian terkait	Sub bagian terkait	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memberikan perintah kepada Kabag Umum dan Kepegawaian untuk mengumpulkan data kinerja							Surat dari Sekretaris DPRD tentang pengumpulan data kinerja	5 menit	Disposisi Sekretaris DPRD dan Disposisi Kabag Umum	-
2	Menugaskan Kasubbag Program dan Keuangan untuk mengumpulkan data kinerja							Disposisi Sekretaris DPRD	5 menit	Disposisi Sekretaris DPRD dan Disposisi Kabag Umum	-
3	Mencari referensi sebagai bahan masukan dalam pengumpulan data kinerja, memperbanyak lampiran surat Sekwan tentang tata cara pengumpulan data kinerja dan menyerahkan ke masing-masing bagian							Disposisi Sekretaris DPRD, Disposisi Kabag Umum dan Kepegawaian, Regulasi data kinerja	1 jam	Surat Sekretaris DPRD dan lampiran tata cara pengumpulan data kinerja yang sudah diperbanyak	-
4	Menerima salinan surat Sekretaris DPRD tentang pengumpulan data kinerja beserta lampirannya dan mendisposisi ke sub bagian terkait							Salinan Surat sekda dan lampiran tata cara pengumpulan data kinerja	5 menit	Salinan Surat sekda dan lampiran tata cara pengumpulan data kinerja yang sudah disposisi kepala bagian	-
5	Mengumpulkan data kinerja dan menyerahkan ke kepala bagian untuk dikoreksi							Salinan Surat Sekretaris DPRD dan lampiran tata cara pengumpulan data kinerja yang sudah disposisi Kepala Bagian	3 jam	Data kinerja masing-masing sub bagian	Dalam pengumpulan data kinerja dilakukan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait jika diperlukan
6	Menerima dan mengoreksi hasil pengumpulan data kinerja dari sub bagian apabila tidak ada hal-hal prinsip untuk diperbaiki menyerahkan ke Kasubbag Program dan Keuangan							Data kinerja masing-masing sub bagian	15 menit	Data kinerja masing-masing sub bagian yang telah dikoreksi	-
7	Menerima dan mengkompilasi pengumpulan data kinerja dari sub bagian dan mengonsep laporan kinerja dan diserahkan ke staf untuk diketik							Data kinerja masing-masing sub bagian yang telah dikoreksi	2 jam	Kompilasi Data kinerja masing-masing sub bagian dan konsep laporan kinerja	-
8	Mengetik laporan kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikumpulkan dan menyerahkan ke kasubbag Program dan Keuangan							Kompilasi Data kinerja masing-masing sub bagian dan konsep laporan kinerja	40 menit	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikumpulkan	-
9	Menerima draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja apabila tidak ada hal-hal prinsip untuk diperbaiki, menyetujui dan menyampaikan ke Kabag Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti							Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikumpulkan	30 menit	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikoreksi	-
10	Menerima draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja, apabila tidak ada hal-hal prinsip untuk diperbaiki diteruskan ke Kabag Umum dan Kepegawaian							Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja	15 menit	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikoreksi	-
11	Menerima draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja, apabila tidak ada hal-hal prinsip untuk diperbaiki diteruskan ke Sekretaris DPRD							Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja	15 menit	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikoreksi	-
12	Menerima draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja, apabila tidak ada hal-hal prinsip untuk diperbaiki, selanjutnya diserahkan ke Kabag Umum dan Kepegawaian dan Anggaran untuk dicetak dan dikirim sesuai alamat surat Sekretaris DPRD							Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikoreksi	20 menit	Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah disetujui	-
13	Menerima Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah disetujui Kepala Bagian dan diteruskan ke Kasubbag Program dan Keuangan untuk dicetak dan dikirim sesuai alamat surat Sekretaris DPRD							Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah disetujui	5 menit	Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah disetujui	-
14	Mencetak dan mendokumentasikan Laporan Kinerja dan mengirimkan ke alamat sesuai surat Sekretaris DPRD							Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah disetujui	2 jam	Dokumen Laporan Kinerja siap didokumentasikan dan dikirim	pengiriman dilaksanakan sesuai SOP surat menyurat

PROSEDUR: SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	Pelaksana	Uraian Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Sekretaris Daerah	Memberikan perintah kepada Asisten I/II/III untuk mengumpulkan data kinerja	Surat dari Sekretaris Daerah tentang pengumpulan data kinerja	5 menit	Disposisi Sekretaris Daerah	
2	Asisten I/II/III	Menugaskan Kabag. Perencanaan dan Penganggaran untuk mengumpulkan data kinerja	Disposisi Sekretaris Daerah	5 menit	Disposisi Sekretaris Daerah dan Disposisi Asisten	
3	Kabag. Perencanaan dan Anggaran	Menugaskan Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengumpulkan data kinerja	Disposisi Sekretaris Daerah dan Disposisi Asisten	5 menit	Disposisi Sekretaris Daerah, Disposisi Asisten, Disposisi Kabag Perencanaan dan Anggaran	
4	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Mencari referensi sebagai bahan masukan dalam pengumpulan data kinerja, memperbanyak lampiran surat sekda tentang tata cara pengumpulan data kinerja dan menyerahkan ke masing-masing bagian	Disposisi Sekretaris Daerah, Disposisi Asisten, Disposisi Kabag Perencanaan dan Anggaran, Regulasi data kinerja	1 jam	Surat sekda dan lampiran tata cara pengumpulan data kinerja yang sudah diperbanyak	
5	Bagian terkait	Menerima salinan surat Sekretaris DPRD tentang pengumpulan data kinerja beserta lampirannya dan mendisposisi ke sub bagian terkait	Salinan Surat sekda dan lampiran tata cara pengumpulan data kinerja	5 menit	Salinan Surat sekda dan lampiran tata cara pengumpulan data kinerja yang sudah disposisi kepala bagian	
6	Subbagian terkait	Mengumpulkan data kinerja dan menyerahkan ke kepala bagian untuk dikoreksi	Salinan Surat sekda dan lampiran tata cara pengumpulan data kinerja yang sudah disposisi kepala bagian	3 jam	Data kinerja masing-masing sub bagian	Dalam pengumpulan data kinerja dilakukan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait jika diperlukan
7	Bagian terkait	Menerima dan mengoreksi Hasil pengumpulan data kinerja dari sub Bagian apabila tidak ada hal-hal prinsip untuk diperbaiki menyerahkan ke Kasubag Perencanaan dan Evlap	Data kinerja masing-masing sub bagian	15 menit	Data kinerja masing-masing sub bagian yang telah dikoreksi	
8	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Menerima dan mengkompilasi pengumpulan data kinerja dari sub bagian dan mengonsep laporan kinerja dan diserahkan ke staf untuk diketik	Data kinerja masing-masing sub bagian yang telah dikoreksi	2 jam	Kompilasi Data kinerja masing-masing sub bagian dan konsep laporan kinerja	
9	Staf	Mengetik Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikumpulkan dan menyerahkan ke kasubag perencanaan dan evlap	Kompilasi Data kinerja masing-masing sub bagian dan konsep laporan kinerja	40 menit	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikumpulkan	
10	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Menerima Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja apabila tidak ada hal-hal prinsip untuk diperbaiki, menyetujui dan menyampaikan ke Kabag Perencanaan dan Anggaran untuk ditindaklanjuti	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikumpulkan	30 menit	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikoreksi	
11	Kabag. Perencanaan dan Anggaran	Menerima Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja, apabila tidak ada hal-hal prinsip untuk diperbaiki diteruskan ke Asisten	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja	15 menit	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikoreksi	
12	Asisten I/II/III	Menerima Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja, apabila tidak ada hal-hal prinsip untuk diperbaiki diteruskan ke Sekretaris Daerah	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja	15 menit	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikoreksi	
13	Sekretaris Daerah	Menerima Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja, apabila tidak ada hal-hal prinsip untuk diperbaiki, selanjutnya diserahkan ke Kabag Perencanaan dan Anggaran untuk dicetak dan dikirim sesuai alamat surat Sekretaris Daerah	Draft Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah dikoreksi	20 menit	Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah disetujui	
14	Kabag. Perencanaan dan Anggaran	Menerima Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah disetujui Kepala Badan dan diteruskan ke Kasubag Penyusunan Program untuk dicetak dan dikirimkan sesuai alamat surat sekretaris daerah	Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah disetujui	5 menit	Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah disetujui	
15	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Mencetak dan mendokumentasikan Laporan Kinerja dan mengirimkan ke alamat sesuai surat sekretaris daerah	Laporan Kinerja dengan kelengkapan data kinerja yang telah disetujui	2 jam	Dokumen Laporan Kinerja siap didokumentasikan dan dikirim	pengiriman dilaksanakan sesuai SOP surat menyurat

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH SEKRETARIAT DAERAH</p>	NOMOR SOP	910/ 36 /P&A/Setda-2019
	TANGGAL PEMBUATAN	1 Maret 2019
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	1 Mei 2019
	DISAHKAN OLEH	 DT. H. RIDA ANANDA 680607 198809 1 001
	NAMA SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME	1. Memahami peraturan-peraturan yang berkaitan Laporan Kinerja 2. mampu mengoperasikan aplikasi komputer	
2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH		
3 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA , PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH		
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan	1. Komputer	
SOP Surat Menyurat	2. Printer	
	3. Dokumen Perencanaan	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Pengumpulan Data Kinerja diperlukan untuk melihat capaian kinerja pada tahun berjalan	1. Data Kinerja dikumpulkan dalam bentuk Laporan Kinerja	



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH INSPEKTORAT

Jln. Gelatik, Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh,
Sumatera Barat 26218 Email : inspektoratpyk@gmail.com

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah melakukan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Payakumbuh, Maret 2025

Inspektur Kota Payakumbuh

ANDRI NARWAN, S.SOS, M.M, CGCAE

Pembina Utama Muda /

NIP. 19730319 199308 1 001